

TATA KELOLA KELOMPOK TANI SEBAGAI PENDUKUNG PENGEMBANGAN SEKTOR

Purbayu Budi Santosa¹⁾, Wiludjeng Roessali²⁾, Ariza Fuadi³⁾, Darwanto⁴⁾

^{1), 2), 3), 4)}Universitas Diponegoro

Email : darwantomsiugm@gmail.com

ABSTRACT

Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan sangat strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, sektor pertanian masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan seperti tidak terjaminnya kesejahteraan petani, kurangnya akses untuk memperoleh permodalan dan masalah pemasaran hasil panen. Kehadiran kelompok tani dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) belum mampu mengoptimalkan potensi dari sektor pertanian. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis struktur dan jaringan kelembagaan pada pelaku usaha tani setempat serta menganalisis kelembagaan kelompok tani setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghimpun data melalui indepth interview, focus group discussion (FGD) dan observasi yang melibatkan partisipasi dari pelaku sektor pertanian setempat dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif studi kasus dengan metode analisis Analytical Network Process (ANP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh petani di Provinsi Jawa Tengah tergabung dalam kelompok tani dan menerapkan sistem pembiayaan syariah. Sistem pembiayaan syariah yang diterapkan oleh kelompok tani melalui BMT maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha pertanian kelompok tani di Provinsi Jawa Tengah.

Keywords: kelembagaan, kelompok tani, lembaga keuangan syariah, ANP.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan wilayah laut seluas 3.257.483 km² dan daratan seluas 1.910.931 km² (BPS, 2014). Indonesia memiliki potensi yang melimpah dari sektor pertanian sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian berperan strategis bagi perekonomian nasional. Sektor pertanian telah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 14.44% dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 35.09% dari jumlah tenaga kerja nasional (BPS, 2013). Terlepas dari fakta tersebut, sektor pertanian merupakan sektor yang dinilai memiliki resiko yang tinggi. Selain resiko yang tinggi, permasalahan lainnya adalah permasalahan kelembagaan dan tata niaga (Santosa Purbayu, B. dan

Darwanto, 2015). Kelembagaan diperlukan dalam proses produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Kelembagaan pada usaha tani berperan penting dalam pengembangan usaha pertanian, salah satunya adalah melalui kelompok tani. Kelompok tani dibangun berdasarkan pada kesamaan usaha yang bertujuan atas dasar kebersamaan dan pemenuhan sarana usaha. Akan tetapi, kelompok tani sering mengalami hambatan, seperti : 1) kurangnya wawasan dan pengetahuan petani tentang manajemen produksi beserta pemasarannya; 2) kurangnya keterlibatan petani dalam kegiatan agribisnis; dan 3) peran fungsi kelembagaan belum berjalan optimal (Nasrul, 2012). Kelembagaan pada umumnya masih dibangun melalui pendekatan top – down, yaitu melalui cetak biru yang seragam dan

kurang menggali struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang ada, sehingga pengembangan kelembagaan lebih difokuskan terhadap aspek strukturalnya dan minim penguatan terhadap aspek kulturalnya (Parma, 2014).

Selain masalah kelembagaan, permasalahan permodalan menjadi masalah lain yang dihadapi oleh pelaku usaha pada sektor pertanian. Akses masyarakat pedesaan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan masih minim. Berdasarkan data global financial inclusion tahun 2011 hanya 26.03% masyarakat pedesaan negara yang berpendapatan menengah bawah (termasuk Indonesia) yang memiliki keuangan di lembaga keuangan formal (World Bank, 2011). Masalah pendanaan yang dialami pelaku usaha sektor pertanian menjadi latar belakang munculnya berbagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia. Sifat lembaga keuangan mikro yang mudah diakses oleh masyarakat pedesaan dan karakteristik LKMS dengan menerapkan prinsip syariah Islam dalam bertransaksi menjadikan lembaga ini mudah diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Kehadiran pembiayaan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang umumnya bergerak dalam bidang pertanian. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan jaringan kelembagaan pada pelaku usaha tani setempat serta menganalisis kelembagaan kelompok tani setempat.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis bertujuan untuk menganalisis struktur dan jaringan kelembagaan pada pelaku usaha tani setempat serta menganalisis kelembagaan kelompok tani setempat. Analisis penelitian didasarkan pada data primer yang diperoleh dari indepth interview dengan key person terkait dengan kelembagaan dan pembiayaan petani serta kelompok tani. Penelitian

dilakukan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan di Provinsi Jawa Tengah. Secara khusus penelitian ini akan dilakukan sentra-sentra pertanian lokal yang memperoleh pendanaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) setempat. Metode analisis adalah metode Analytical Network Process (ANP). ANP dijelaskan Saaty dalam Pungkasanti (2013) sebagai suatu teori umum pengukuran relatif yang dipergunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang menunjukkan pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria kontrol..

HASIL DAN PEMBAHASAN

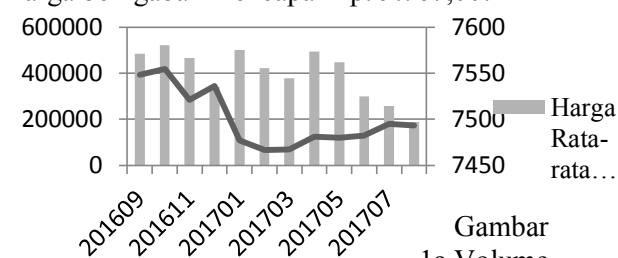
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat ketersediaan bahan makanan yang tinggi sehingga Pemerintah berupaya untuk tetap menjaga kondisi tersebut sehingga kebutuhan pangan di Jawa Tengah dapat tetap terpenuhi. Upaya tersebut antara lain seperti : 1) tetap menjaga dan mempertahankan luas lahan sawah (luas lahan sawah Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen/ 872 ha pada tahun 2008 hingga 2012); 2) menciptakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan pada tahun 2006-2012 dengan jumlah desa yang dikembangkan mencapai 281 desa dalam periode pelaksanaan program; 3) melakukan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mendukung distribusi bahan pangan sehingga bahan pangan tersedia bagi semua konsumen. Sistem Informasi Toko Tani Indonesia, Kementerian Pertanian mencatat pada tahun 2016 dan 2017 telah terdapat 128 Gapoktan baru yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Gapoktan tersebut didukung dengan dibentuknya Toko Tani Indonesia (TTI). Pembentukan TTI ditujukan untuk pencapaian kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Manfaat TTI antara lain : 1) memangkas rantai pasok dari produsen ke konsumen; 2) menekan

disparitas harga dari produsen ke konsumen; dan 3) secara berkelanjutan membentuk struktur pasar baru. Jumlah TTI baru Provinsi Jawa Tengah tercatat telah mencapai 230 TTI di tahun 2016.

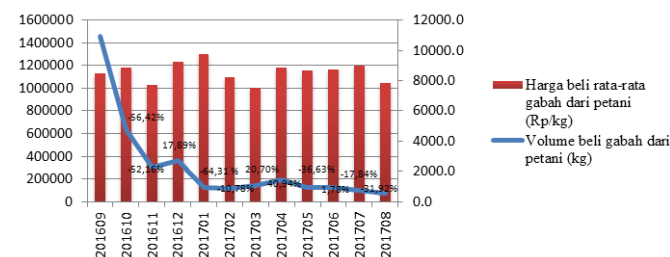
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai yang tercantum pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang tercantum pula pada UU No. 19 Tahun 2013. Strategi perlindungan petani di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui : 1) prasarana dan sarana produksi pertanian; 2) penyediaan lahan pertanian; 3) kepastian usaha; 4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; 5) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; 6) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; 7) asuransi pertanian; 8) bantuan dan subsidi; 9) komoditas unggulan; 10) hak kekayaan intelektual; dan 11) perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan strategi pemberdayaan petani di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui : 1) pendidikan dan pelatihan; 2) penyuluhan dan pendampingan; 3) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; 4) konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; 5) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; 6) regenerasi petani; dan 7) penguatan kelembagaan petani.

Hasil produksi Gapoktan Provinsi Jawa Tengah meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa komoditas padi (subsektor tanaman pangan) merupakan komoditi dengan produksi pertanian terbesar yang dihasilkan di Provinsi Jawa Tengah. Gambar 1 menunjukkan Volume dan Harga Komoditas Beras Provinsi Jawa Tengah September 2016 hingga Agustus 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Gapoktan 2016 terlihat adanya penurunan drastis volume beras tingkat Gapoktan pada Januari 2017 yang berlanjut hingga Februari 2017 (Gambar 1a).

Berkurangnya volume beras tersebut berdampak pada meningkatnya harga beras Gapoktan per kg mencapai sekitar Rp. 7.576,00 pada Januari 2017 dan mengalami penurunan harga menjadi Rp. 7.556,00 pada Februari 2017. Selain adanya penurunan volume beras Gapoktan, penurunan terjadi pula pada volume beli gabah dari petani sebesar 64,31% pada Januari 2017 dan 10,78% pada Februari 2017 (Gambar 1b). Penurunan drastis volume beli gabah pada Januari 2017 dibarengi dengan meningkatnya harga beli gabah mencapai Rp. 9.767,00.



Gambar 1a. Volume dan Harga Komoditas Beras September 2016 – Agustus 2017



Gambar 1b. Volume dan Harga Komoditas Beras September 2016 – Agustus 2017

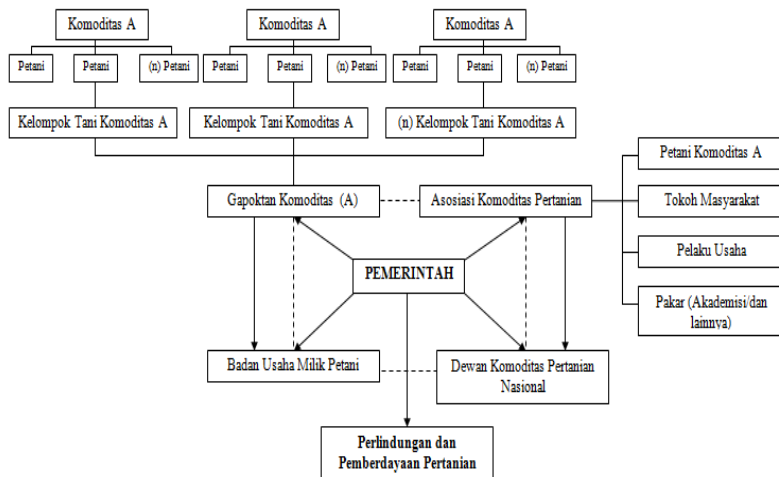
Kelembagaan Kelompok Tani

Kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan Pemberdayaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah salah satu rencana program dan kegiatan daerah bidang pertanian Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian. Salah satu tolok ukuran tercapainya kegiatan tersebut adalah adanya penguatan kapasitas kelembagaan pengurus Gapoktan. Kelembagaan Gapoktan yang terstruktur akan berpengaruh positif terhadap kondisi kelompok tani beserta anggotanya. Permasalahan kelembagaan menjadi salah

satu dasar permasalahan pada sektor pertanian. Permasalahan kelembagaan sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah umumnya meliputi : 1) optimalisasi kinerja pengurus dan anggota kelompok tani; dan 2) optimalisasi fungsi dan peranan organisasi sektor pertanian.

Kelembagaan sektor pertanian diaplikasikan dalam pembentukan kelompok tani pada tingkat desa/dusun, Gapoktan pada tingkat kecamatan, dan Asosiasi Komoditas Pertanian pada tingkat Kabupaten/Provinsi. Penerapan kelembagaan pada pengembangan sektor pertanian khususnya sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mempermudah pemerintah pusat untuk memantau dan mengkoordinasi sektor pertanian dalam upaya pengembangan sektor pertanian di setiap kabupaten, kecamatan maupun desa. Selain itu adanya kelembagaan dalam sektor pertanian mempermudah petani dalam memperoleh informasi mengenai harga maupun bantuan pemerintah seperti dana bantuan, bantuan peralatan hingga pelatihan serta pendampingan

Gambar 4.2. Kelembagaan Petani



Catatan : A : komoditas pertanian (sebagai contoh : beras dan lainnya)

n : jumlah (sejumlah petani, sejumlah kelompok tani)

Pembiayaan Kelompok Tani

Tidak seluruh kelompok tani di Provinsi Jawa Tengah menerapkan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah umumnya diterapkan oleh kelompok tani melalui Baitul

Maal Tanwil (BMT) dan koperasi simpan pinjam (KPS). BMT menerapkan akad pembiayaan syariah, tetapi hanya beberapa akad diperuntukan dalam pembiayaan kelompok tani seperti akad musyarakah dan akad ijarah. Akad musyarakah dijelaskan sebagai akad dalam pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil sedangkan akad ijarah merupakan bentuk penyaluran dana dalam bentuk pembayaran sewa atas peminjaman hak guna barang dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa adanya pengalihan kepemilikan barang (Soemitra, 2015). Apabila masa panen tiba, petani maupun kelompok tani yang menerapkan pembiayaan musyarakah akan membagi keuntungan bersama dan sebaliknya apabila petani/kelompok tani mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama pula. Adanya BMT membantu pemasaran produk pertanian melalui pemotongan jalur pemasaran dari petani ke tengkulak sehingga para petani tidak diharuskan untuk menjual hasil panen pada tengkulak. BMT akan membeli hasil panen dengan harga yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh tengkulak. Selain itu BMT juga memberikan bantuan berupa servis alat-alat pertanian yang mengalami kerusakan dengan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan petani disamping itu BMT juga memberikan bantuan penyediaan benih. Permasalahan yang umumnya terjadi pada pembiayaan di BMT tersebut adalah adanya kredit macet.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menerapkan pembiayaan syariah skema Bai-al Murabahah. Bai al-murabahah merupakan jual beli barang pada harga awal barang dengan tambahan keuntungan yang telah ditentukan antara pihak yang bersangkutan. Skema ini diterapkan pada bentuk usaha baru yaitu toko yang menjual kebutuhan pertanian. Keberadaan toko tersebut mempermudah petani, kelompok tani dan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pertanian. Konsumen toko tidak terbatas pada anggota koperasi saja, pembeli non anggota

juga dapat melakukan transaksi. Produk-produk yang disediakan merupakan hasil dari kerjasama mitra yang telah disetujui bersama.

SIMPULAN

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat ketersediaan bahan makanan yang tinggi sehingga Pemerintah berupaya untuk tetap menjaga kondisi tersebut sehingga kebutuhan pangan di Jawa Tengah dapat tetap terpenuhi. Salah satu upaya pemerintah adalah memperkuat Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mendukung distribusi bahan pangan sehingga bahan pangan tersedia bagi semua konsumen. Hingga tahun 2016 dan 2017 jumlah kelompok tani baru mencapai 128 kelompok tani. Penerapan kelembagaan di kelompok tani akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan kelompok tani dan disamping itu akan mempermudah pemerintah pusat untuk memantau dan mengkoordinasi sektor pertanian dalam upaya pengembangan sektor pertanian di setiap kabupaten, kecamatan maupun desa. Pembiayaan syariah yang diterapkan pula oleh beberapa kelompok petani di Jawa Tengah memberikan dampak positif yaitu petani dapat meminimalisir kerugian pada masa panen dengan menerapkan akad musyarakah dan memperoleh kemudahan untuk memenuhi sarana prasarana pertanian dengan menerapkan akad ijarah dan bai' al murabahah sesuai kesepakatan BMT/LKMS. Kelompok petani juga memperoleh bantuan dari LKMS (BMT dan Koperasi) berupa penyediaan benih dan perbaikan peralatan pertanian dengan harga yang disesuaikan dengan kemampuan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. 2009. Keadilan Deskriptif dalam Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. 2001. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, B. 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Badan Pusat Statistik. 2014. <http://www.bps.go.id>
- Bank Indonesia. 2007. Perbankan Syariah h. 37. Jakarta: Bank Indonesia.
- Davy, H. 2015. Pedoman Pembiayaan Pertanian sesuai Syariah. http://www.academia.edu/3594207/Pedoman_Pembiayaan_Pertanian_sesuai_Syariah, diakses Tanggal 19 April 2016.
- Hermanto, dan Swastika, D.K.S. 2011. Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol 9 No.4: 371-390.*
- Ledgerwood, J. 1999. Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective. Washington DC: Banco Mundial.
- Maryati, S. Peran Bank Pembiayaan Rakyat syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat. *Journal of Economic dan Economic Edeucation Vol. 3 No. 1: 1-17.*
- Nasrul, W. 2012. Pengembangan Kelembagaan Pertanian Untuk Peningkatan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Pertanian. *Jurnal Menara Ilmu, Vol. III No. 29.*
- Parma, P. G. 2014. Pengembangan Model Penguatan Lembaga Pertanian Sebagai *Prime Mover* Pembangunan Kawasan Daerah Penyangga Pembangunan (DPP) Destinasi Wisata Kintamani-Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 1.*
- Pungkasanti, P. T. (2013). *Penerapan Analytical Network Process (ANP) sebagai Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemberian Reward Dosen.* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Santosa, P. B., dan Darwanto. 2015. Strategi Penguatan Kelompok Tani Dengan Penguatan Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: 33-45.*

- Saptana, Pranadji, T., Syahyuti, Elizabeht, E.
2003. Transformasi Kelembagaan Tradisional. Bogor: PSE.
- Soemitra, A. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Oktavendy, G. A. 2015. Peran Pembiayaan BMT untuk Pengembangan Pertanian di Desa Berbasis Pertanian. Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB.
- Wibowo, H., dan Hayati, N. 2013. Strategi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Dalam Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Agribisnis. *Proceeding Seminar Nasional dan Call For Papers Sancall 2013*.
- World Bank. 2011. Global Financial Inclusion Database. <http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx> diakses pada 18 April 2016.